



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. dr. Setiabudi Nomor 3 Telp. (0271) 892970

Website : <http://www.sragenkab.go.id> E-mail : satpol@sragenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 300.1/ 377.a /21/2024

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah perlu menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);

9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen Tahun 2025, yang selanjutnya disebut Renja Satpol PP Kabupaten Sragen Tahun 2025.
- KEDUA : Renja Satpol PP Kabupaten Sragen Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen pada tahun 2025.
- KETIGA : Renja Satpol PP Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen Tahun 2025.
- KEEMPAT : Penyajian dokumen Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun sekurang-kurangnya menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 17 Juli 2024

Plt. KEPALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

AGUS WINARNO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kab. Sragen;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kab. Sragen;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sragen;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Sragen.



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
HUMANIS, TEGAS, WIBAWA

RENCANA KERJA (RENJA) 2025



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SRAGEN**



sragenkab.go.id



satpol@sragenkab.go.id



(0271) 892970



Jl. Dr. Setia Budi No. 3 Sragen

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja ini terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Rencana Kerja (Renja) ini juga merupakan satu rangkaian perencanaan yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dalam penyusunan program pembangunan daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kami mohon masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan dokumen ini. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini. Semoga bermanfaat bagi semua pihak.

- Sragen, 17 Juli 2024

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SRAGEN



AGUS WINARNO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710313 199803 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	 9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	30
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	33
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 43
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	43
3.2. Tujuan dan Sasaran	45
3.3. Program dan Kegiatan	48
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 51
 BAB V PENUTUP	 57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran *vital* dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara *terminologi*, perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. Menurut Arthur W. Lewis (1965) mendefenisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumberdaya yang tersedia lebih produktif. Sedangkan Jenseen (1995) merekomendasikan perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks, sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya lainnya. Riyadi (2002 : 8)

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan,

dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Rencana kerja ini memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah diminta menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan

Persiapan penyusunan renja meliputi : (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah; (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup: (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan (b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

3. Penyusunan Rancangan

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPERIDA Kabupaten Sragen dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan, yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

6. Penetapan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.1.3 Keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

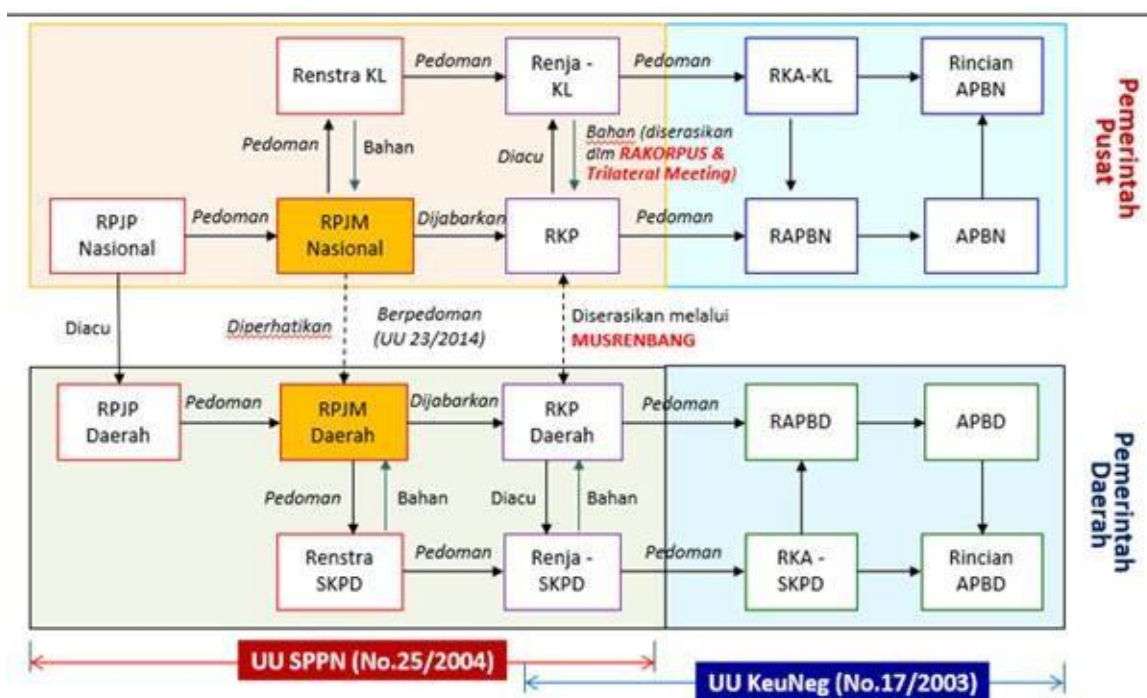
Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen dari rancangan awal Renja sampai rancangan akhir Renja dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Rancangan Awal RKPD, dan Rancangan Akhir RKPD. Pada penyusunan Renja Perangkat Daerah

berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam f Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dilakukan. Rancangan Awal Renja kemudian disempurnakan menjadi Rancangan Renja. Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan Awal RKPD. Rancangan Renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Sragen untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Rancangan Renja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra perangkat daerah, dengan Renja K/L serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD dapat dilihat pada diagram berikut:

Gambar 1
Diagram Keterkaitan Dokumen



1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen 2025, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
14. Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 71);

15. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen adalah:

- a. Sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan Satuan Polisi pamong Praja dalam kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2025;
- b. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan satuan polisi Pamong Praja;
- c. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen Tahun 2025 secara sistematis terdiri dari 5 (lima) bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
	3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sesuai dengan pasal 126 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu adalah tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan adalah tahun 2024. Pada tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sragen mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.148.895.312 yang terbagi dalam 3 (tiga) program 11 (sebelas) kegiatan dan 26 sub kegiatan. Realisasi anggaran sampai dengan akhir Desember 2023 (Triwulan IV) sebesar Rp. 8.662.646.465 atau 94,69% dari total anggaran. Penyerapan anggaran sudah baik dan secara fisik juga baik. Secara umum hampir semua program dan kegiatan memenuhi target kinerja keluaran, bahkan melebihi target. Kajian terhadap Program-program Satpol PP Kab. Sragen Tahun 2023 adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja: Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah. Jumlah anggaran Rp. 7.197.476.309, realisasi 6.767.312.458 (94,02%). Secara fisik target kinerja 100% , realisasi 100% sehingga capaian 100%. Program ini terdiri dari:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (terdiri 2 sub kegiatan)

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (terdiri 1 sub kegiatan)
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (terdiri 1 sub kegiatan)
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (terdiri 5 sub kegiatan)
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (terdiri 1 sub kegiatan)
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (terdiri 3 sub kegiatan)
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (terdiri 1 sub kegiatan)
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Jumlah anggaran Rp. 916.803.303, realisasi Rp. 864.926.050 (94,34%). Indikator kinerja: (a) Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat ditangani dan diselesaikan. Target kinerja 100%, realisasi 100%, sehingga capaian kinerja 100%; (b) Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan. Target kinerja 55%, realisasi 71,42%, sehingga capaian 129.85%. Program ini terdiri dari:
- a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (terdiri dari 6 Sub Kegiatan)
 - b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota (terdiri dari 2 sub kegiatan)
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- Jumlah anggaran 1.034.615.700, realisasi 1.030.407.957 (99,59%). Indikator kinerja prosentase cakupan pelayanan pemadaman kebakaran dan Non Kebakaran. Target kinerja 100%, realisasi 100%, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100%. Program ini terdiri :
- a. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (terdiri 3 sub kegiatan)
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran (terdiri 1 sub kegiatan)

Hasil kajian/evaluasi pelaksanaan Renja Satpol PP Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan, yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Dari 54 orang yang direncanakan terealisasi 52 orang (96,32%), karena pensiun/purna tugas. Untuk Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan, yaitu Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota. Dari target yang direncanakan 258 kali yaitu : Pengumpulan Informasi Rokok Illegal 113 kali, terealisasi 109 kali; Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal 86 kali terealisasi 83 kali dan Penegakan Perda/Perkada (Penanganan Aduan; Penegakan Perda; Yustisi dan APK) 59 kali terealisasi 60 kali. Untuk Barang kena Cukai Illegal tidak tercapai karena waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi (sumber dana DBHCHT masuk di anggaran pergeseran dan kegiatan baru dilaksanakan sekitar bulan Maret-April 2023).

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Untuk tahun 2023 terdapat 17 Sub kegiatan yang memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan (100%), yaitu:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- c. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
- d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- f. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- h. Pengadaan Mebel;
- i. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- j. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
- k. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;

- l. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- m. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- n. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada;
- o. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
- p. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri;
- q. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Untuk tahun 2023 terdapat 7 Sub kegiatan yang melebihi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan lebih dari 100%, yaitu:

- a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 Dari target yang direncanakan sebanyak 35 laporan, realisasi 44 laporan, jadi capaiannya 125,71%. Karena anggaran yang terbatas, kelebihan target kinerja tersebut tidak mendapatkan anggaran (tetap melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dengan zero anggaran)
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 Dari target yang direncanakan sebanyak 17 kendaraan roda 4 (empat) dan 13 kendaraan roda 2 (dua), total 30 unit. Terealisasi 17 kendaraan roda 4 (empat) dan 14 kendaraan roda 2 (dua), total 31 unit. Pada akhir Desember 2023 terdapat mutasi kendaraan yang harus dibayarkan biaya pajaknya
- c. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan. Aktivitas Sub kegiatan ini berupa Patroli wilayah, PAM/Pengawasan rutin, PAM/Supervisi Kemukus, PAM/Patroli Pemilu dan Voorijder. Jumlah kasus pelanggaran yang didapat pada aktivitas ini sebanyak 1.877 dari 1.861 kasus yang ditargetkan dan semua tertangani dengan baik, sehingga capaiannya 100,86%. Jumlah kasus pelanggaran tersebut berupa:

1. PGOT : 351
2. ODGJ : 69
3. PKL : 811
4. WTS : 13
5. Pelajar : 242
6. Miras : 6
7. APK : 289
8. Live music : 48
9. Kemukus : 48

d. Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa. Aktivitas sub kegiatan ini berupa penindakan gangguan trantibum berdasar aduan masyarakat dan operasi yang dijadwalkan dari Satpol PP. Dari 68 aduan yang ditargetkan terdapat 69 aduan yang ditangani dan diselesaikan, sehingga capaian kinerjanya 101,47%. Aduan-aduan tersebut berupa :

1. PGOT : 23
2. ODGJ : 14
3. Keramaian : 18
4. PKL : 3
5. WTS : 5
6. Pelajar : 6

e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia. Aktivitas sub kegiatan ini berupa pengiriman peserta dalam HUT Satpol PP di Magelang dan Solo sebanyak 121 orang dan peningkatan anggota Satpol PP dan Damkar (Outbond) sebanyak 90 orang. Dari yang ditargetkan 210 orang, realisasi 211 orang sehingga capaian 100,48%.

f. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pada tahun 2023 terjadi 193 kasus kebakaran di wilayah Kabupaten Sragen dari 175 kasus yang ditargetkan. Semua kejadian kebakaran ditangani/dilayani semua dengan baik, meski dengan respon time yang berbeda. Sehingga capaian kinerjanya 110,29%.

- g. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran.

Pada tahun 2023 terdapat layanan evakuasi lainnya (Tawon, pelepasan cincin, evakuasi ular, laka sumur dan evakuasi lainnya) sebanyak 321 kali dari 182 yang ditargetkan, sehingga capaiannya 176,37%

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Sub kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota. Capaian kinerja 97,67%. dari target 258 laporan, terealisasi 252 laporan. Faktor penghambat tidak tercapainya target, karena aktivitas dengan sumber dana DBCHT baru dilaksanakan sekitar bulan Maret-April 2023, sehingga waktu kurang mencukupi.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Dari 54 orang yang direncanakan terealisasi 52 orang (96,32%), karena pensiun/purna tugas.

Faktor penyebab tercapainya atau memenuhi target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Regu piket Satpol PP yang *standby* 24 jam;
- b. Adanya inovasi “SIJAGA SUKOWATI” yang mudah diakses;
- c. Adanya koodinasi dengan Kasi Trantib seluruh Kecamatan se Kab. Sragen;
- d. Adanya *Whatshap group* sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antar anggota;
- e. Koordinasi yang baik antar Instansi / lintas sektoral;
- f. Dukungan anggaran dan sarana prasarana;
- g. SOP yang jelas;
- h. Petugas Damkar kompeten, *standby* dan *oncall*.

5. Implikasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah.

Dari 4 (empat) indikator kinerja program yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Sragen tahun 2023, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang berdampak

langsung pada target capaian program Renstra Satpol PP Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Prosentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat ditangani dan diselesaikan;
2. Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan; dan
3. Prosentase cakupan pelayanan pemadaman kebakaran dan Non Kebakaran.

Adapun capaian ketiga indikator tersebut terhadap target pada tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Prosentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat ditangani dan diselesaikan tercapai 100% dari target 100%;
2. Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan mencapai 71,42% melebihi target sebesar 55%;
3. Prosentase cakupan pelayanan pemadaman kebakaran dan Non Kebakaran tercapai 100% dari target 100%.

6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk meningkatkan capaian kinerja dan mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan antara lain:

1. Dalam perencanaan target kinerja, diupayakan berdasarkan kondisi yang sebenarnya dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Meningkatkan pemahaman dasar tentang dokumen perencanaan baik dari tingkat Pemangku Kebijakan tertinggi sampai Pelaksana Teknis Kegiatan, sehingga dokumen perencanaan tidak dianggap hanya sebagai kelengkapan administratif agar hasil pelaksanaan kegiatan dapat lebih terukur dan jelas;
3. Dalam menyusun perencanaan dan penganggaran, perhatian utama bukan hanya pada proses dan penyerapan/pencairan anggaran, tetapi juga harus lebih memperhatikan faktor-faktor penting dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja untuk menghindari permasalahan seperti:
 - a. Fokus kinerja tidak sesuai dengan indikator kinerja utama;
 - b. Target kinerja tidak berorientasi pada hasil/outcome;

- c. Dokumen perencanaan yang satu dengan yang lainnya tidak konsisten;
- d. Indikator kinerja tidak dapat diukur secara obyektif dan tidak relevan;
- e. Data capaian kinerja yang tidak konsisten sehingga mengakibatkan penentuan target kinerja terlalu tinggi atau terlalu rendah.

Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen periode sd Triwulan IV Tahun 2023, dapat dilihat pada **tabel 2.1** dibawah ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat kinerja SAKIP perangkat daerah (predikat)	BB (70,60)	BB (70,80)	BB (70,30)	BB (73,05)	104	BB (70,40)	BB (73,05)	100
1	01	01	01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (dokumen)	20	4	4	4	100	4	12	60
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	10	2	2	2	100	2	6	60

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dokumen)	10	2	2	2	100	2	6	60
1	01	01	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (laporan)	60	12	12	12	100	12	36	60
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang /bulan)	60	57/12	54/12	52/12	100	56/12	56/36	100
1	01	01	02		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (laporan)	60	12	12	12	100	12	36	60
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	5	1	1	1	100	1	3	60
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	5	1	2	2	100	2	5	100
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	325	64	60	60	100	60	184	56
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	5	1	2	2	100	1	4	80

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Penggandaan yang Disediakan (paket)									
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	98	29	35	44	125,71	60	133	135
1	01	01	03		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	60	12	12	12	100	12	36	60
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	60	12	12	12	100	12	36	60
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	60	12	12	12	100	12	36	60
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	60	12	12	12	100	12	36	60

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	01	04	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	60	12	12	12	100	12	36	60
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	131	27	30	31	103,33	27	85	64
1	01	02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat ditangani dan diselesaikan (persen)	100	100	100	100	100	100	100	100
					Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (persen)	70	53,57	55	71,42	129,85	60	60	85
1	01	02	01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kabupaten yang ditangani dan diselesaikan (kasus)	16470	2030	1929	1946	100,88	1883	5859	35
				Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Trantibum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,	1940	1958	1861	1877	100,86	1818	5653	291

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan pengawasan (kasus)								
				Sub Kegiatan Penindakan atas gangguan Trantibum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan kerusuhan massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan penindakan (kasus)	750	72	68	69	101,47	65	206	27
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (dokumen)	5	1	2	2	100	1	4	80
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (orang)	120	0	210	211	100,48	317	528	440

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (dokument)	4	0	10	10	100	1	11	275
					Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (laporan)	33	0	5	5	100	5	10	30
1	01	02	02		Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah pelanggaran atas pelaksanaan Perda/Perkada yang ditegakkan (laporan)	8295	1379	1311	1328	73,94	1311	4018	48
					Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha (laporan)	22	4	3	3	100	1	8	36
					Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan	55	0	0	0	0	92	92	167

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Bupati/Walikota (laporan)									
					Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota yang Dapat Ditangani Sesuai SOP (laporan)	138	61	258	252	97,67	110	423	306
1	01	03			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Prosentase cakupan pelayanan pemadaman kebakaran dan Non Kebakaran (persen)	100	100	100	100	100	100	100	100
1	01	03	01		Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat dan non kebakaran) (jenis)	6	4	5	5	100	5	5	83
					Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah	376	85	175	193	110,29	73	351	93

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Kabupaten/Kota (laporan)								
					Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (laporan)	1500	0	182	321	176,37	180	501	33
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (unit)	68	0	16	16	100	0	16	23
1	01	03	022	1	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah relawan kebakaran dibawah binaan Satpol PP (orang)	50	0	0	0	0	30	30	60
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (orang)	800	0	90	90	100	0	90	11

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam mewujudkan visi Kabupaten Sragen yakni ***“Menuju Kabupaten Sragen mandiri, sejahtera dan berbudaya berlandaskan semangat gotong royong”***, misi Satpol PP Kabupaten Sragen sesuai dengan RPJMD tahun 2021-2026 masuk pada misi ke-dua yakni ***“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi”***.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, seperti pada **tabel 2.2**.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023
Satuan Polisi Pamong Praja

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis Tahun 2023
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum			5%	6%	7%	7%	3,96%	6%	7%	7%	Jumlah kasus pelanggaran gangguan trantibum sulit diprediksi jumlahnya, apalagi jika harus dibandingkan juga dengan tahun sebelumnya, karena sangat dipengaruhi banyak faktor, seperti kondisi politik menjelang pemilu, adanya wabah seperti covid 19 dan sebagainya. Formulasi perhitungan IKU 1 sebagai beriku: Jumlah pelanggaran gangguan trantibum data tahun N-1 dikurangi jumlah pelanggaran tahun N dibagi data tahun N-1 dikali 100%
2	Tingkat Pelayanan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum			65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Karena target yang rendah (belum disesuaikan dengan standar nasional), semua target dapat tercapai. Mulai tahun 2024, target disesuaikan seperti Standar Nasional

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis Tahun 2023
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
												Formulasi perhitungan IKU 2 sebagai berikut: Jumlah dan identitas Warga Negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penanganan hukum akibat pelanggaran Perda/Perkada Kab/Kota serta mengalami kerugian materi dan/atau terkena cedera fisik dibagi jumlah Warga Negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum akibat pelanggaran Perda Kab/Kota dan Perkada dikali 100%
3	Persentase penurunan pelanggaran Perda/ Perkada			5%	6%	7%	7%	3,70%	6%	7%	7%	Jumlah kasus pelanggaran penegakan Perda sulit diprediksi jumlahnya, apalagi jika harus dibandingkan juga dengan tahun sebelumnya, karena sangat dipengaruhi banyak faktor, seperti kondisi politik menjelang pemilu, adanya wabah seperti covid 19 dan sebagainya Formulasi perhitungan IKU 3 sebagai berikut: Jumlah pelanggaran Perda/Perkada data tahun N-1 dikurangi jumlah

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis Tahun 2023
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
												pelanggaran Perda/Perkada data tahun N dibagi data tahun N-1 dikali 100%
4	Tingkat Layanan Penanganan Kebakaran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Semua laporan kejadian kebakaran dilayani dengan baik meski dengan waktu tanggap yang berbeda, karena Tim Damkar selalu siaga 24 jam Formulasi perhitungan IKU 4 sebagai berikut: Jumlah kejadian kebakaran yang dilayani dibagi jumlah kejadian kebakaran yang dilaporkan dikali 100%
5	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit penanggulangan			45%	47%	49%	51%	46,63%	47%	49%	51%	Kejadian kebakaran pada tahun 2023 banyak terjadi di wilayah yang dekat dekat mako, sehingga waktu tanggap lebih cepat Formulasi perhitungan IKU 5 sebagai berikut: Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten/Kota pada tahun N dalam tingkat waktu tanggap (response

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis Tahun 2023
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
												time) dibagi jumlah kejadian kebakaran di Kab/Kota tahun N dikali 100%

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk mengukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen, digunakan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

1. Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum;
2. Tingkat pelayanan gangguan keamanan dan ketertiban umum;
3. Persentase penurunan pelanggaran Perda/Perkada;
4. Tingkat layanan penanganan Kebakaran;
5. Tingkat waktu tanggap (*response time*) 15 menit penanggulangan kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, terdapat masalah pokok yang dihadapi sebagai berikut:

- a) belum optimalnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
- b) belum optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran.

Masalah pokok tersebut terjadi karena ada beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masih banyak terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban umum;
2. Masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap Perda/Perkada;
3. Belum memadainya kualitas / kuantitas Sumber Daya pada Satpol PP;
4. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) yang masih kurang.

Dari masalah pokok seperti tersebut diatas, dapat dipetakan masalah dan akar masalah untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Belum optimalnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Masih banyak terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban umum	Masih banyaknya titik-titik konsentrasi PKL, bangunan liar, penyakit masyarakat, peredaran minuman keras
			Patroli pengawasan yang belum optimal
			Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum
		Masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap Perda/Perkada	Kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap penegakan perda/perkada
			Kurangnya sosialisasi Per UU-an kepada Masyarakat
			Belum optimalnya fungsi PPNS
		Belum memadainya kualitas maupun kuantitas Sumber Daya pada Satpol PP	Minimnya sarana prasarana
			Jumlah anggota Satpol PP yang tidak sebanding dengan tupoksi yang harus dilaksanakan
2	Belum optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) yang masih kurang	Kurangnya anggota damkar yang kompeten
			Kurangnya Supras Operasional pendukung kerja yang mampu menjangkau ke seluruh daerah
			Kurangnya sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Masyarakat

Untuk menghadapi permasalahan tersebut, dapat dipetakan terkait tantangan dan peluang sebagai berikut:

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	TANTANGAN DAN PELUANG
1	2	3	4
1	Belum optimalnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Masih banyak terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban umum	Tantangan: 1. Koordinasi antar Lembaga 2. Kurangnya sumber daya 3. Keterbatasan data dan informasi Peluang: 1. Pemanfaatan teknologi digital

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	TANTANGAN DAN PELUANG
1	2	3	4
			2. Pemberdayaan masyarakat 3. Pelatihan dan pengembangan anggota Satpol PP
		Masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap Perda/Perkada	Tantangan: 1. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat 2. Pengawasan dan penegakan hukum Peluang: 1. Sosialisasi secara digital 2. Sistem pelaporan secara online 3. Kolaborasi dengan media
		Belum memadainya kualitas maupun kuantitas Sumber Daya pada Satpol PP	Tantangan: 1. Keterbatasan anggaran 2. Rekrutmen anggota dan pelatihan Peluang: 1. Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan 2. Peningkatan anggaran 3. Pemanfaatan teknologi digital
2	Belum optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) yang masih kurang	Tantangan: 1. Infrastruktur teknologi 2. Kesiapsiagaan operasional 3. Jumlah pos pemadaman Peluang: 1. Implementasi sistem informasi 2. Pelatihan tanggap darurat kebakaran 3. Penggunaan aplikasi mobile untuk memudahkan operasional 4. Peningkatan jumlah pos pemadaman 5. Pelatihan masyarakat terkait pemadaman

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Sragen adalah :

1. Peningkatan Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. Penguatan Penegakan Perda/Perkada;
4. Tingkat waktu penanganan (responsif) terhadap bencana kebakaran dan bencana lainnya;
5. Penurunan tingkat kejadian kebakaran dan bencana lainnya.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan tahun ke-4 dari tahapan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. Tema pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2025 berdasarkan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah **“Peningkatan ekonomi melalui peningkatan investasi, pemberdayaan UMKM dan daya saing pariwisata”**. Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 selanjutnya merupakan pedoman umum dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025. Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah:

1. Perwujudan Kemandirian Ekonomi Daerah;
2. Perwujudan Layanan Investasi yang berkualitas;
3. Pemantapan kualitas infrastruktur wilayah;
4. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah;
5. Penguatan kualitas SDM dan kualitas hidup masyarakat;
6. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
7. Perwujudan ketahanan pangan dan masyarakat;
8. Perwujudan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

Satuan Polisi Pamong Praja termasuk salah satu Perangkat Daerah yang mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang nomor 4 (empat) dengan program utama :

- a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Review terhadap Rancangan awal RKPD Kabupaten Sragen perlu dilakukan untuk melihat keselarasan antar dokumen perencanaan. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, setiap tahun dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten. Selanjutnya SKPD dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) SKPD. Dengan demikian, Rencana Kerja yang disusun oleh SKPD harus linier dan selaras dengan Renstra SKPD, RKPD maupun RPJMD Kabupaten Sragen. Review terhadap Ranwal RKPD Tahun 2025, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Satpol PP Kab. Sragen

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Capaian Program/Keluaran Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Capaian Program/Keluaran Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANTIBUMLINMAS				8.909.709.419	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANTIBUMLINMAS				8.909.709.419	
1	05	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sragen			7.445.480.119	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sragen			7.445.480.119	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)
1	05	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sragen	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen)	4	9.999.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sragen	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen)	4	9.999.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)
1	05	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sragen	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sragen	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	5.000.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)
1	05	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sragen	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	4.999.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sragen	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	4.999.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)
1	05	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sragen	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	12	6.709.615.119	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sragen	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	12	6.709.615.119	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)
1	05	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sragen	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/Bulan)	57	6.709.615.119	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sragen	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/Bulan)	57	6.709.615.119	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)
1	05	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sragen	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Laporan)	12	239.149.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sragen	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Laporan)	12	239.149.500	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)
1	05	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sragen	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan	1	4.206.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sragen	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan	1	4.206.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Capaian Program/Keluaran Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Capaian Program/Keluaran Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								bangunan kantor yang disediakan (Paket)					bangunan kantor yang disediakan (Paket)			
1	05	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sragen	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	2	12.533.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sragen	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	2	28.778.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)
1	05	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sragen	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	65	165.660.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sragen	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	65	180.035.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)
1	05	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sragen	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	1	3.737.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sragen	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	1	4.500.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)
1	05	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab./Kota Luar Daerah Kab. Sragen	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	60	50.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab./Kota Luar Daerah Kab. Sragen	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	60	52.536.700	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)
1	05	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sragen	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	3.013.500	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sragen	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	3.013.500	Baru (Sudah tercantum di Renstra)
1	05	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sragen	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	12	90.408.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sragen	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	12	90.408.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)
1	05	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sragen	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan (Laporan)	12	14.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sragen	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan (Laporan)	12	77.500.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)
1	05	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sragen	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	12	4.670.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sragen	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	12	4.670.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Capaian Program/Keluaran Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Capaian Program/Keluaran Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	05	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sragen	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	12	71.338.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sragen	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	12	71.338.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)
1	05	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sragen	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	12	396.308.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sragen	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	12	386.280.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)
1	05	01	2	09	02	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sragen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31	396.308.500	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sragen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31	396.308.500	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)
1	05	02				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Sragen	Prosentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat ditangani dan diselesaikan	100	538.229.300	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Sragen	Prosentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat ditangani dan diselesaikan	100	538.229.300	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)
								Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	65				Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	60		
1	05	02	2	01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sragen	Jumlah kasus pelanggaran dan pengaduan transtibum dalam Kabupaten yang ditangani dan diselesaikan (Kasus)		359.737.300	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sragen	Jumlah kasus pelanggaran dan pengaduan transtibum dalam Kabupaten yang ditangani dan diselesaikan (Kasus)		359.737.300	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)
1	05	02	2	01	01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kab. Sragen	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan pengawalan (Kasus)		75.375.000	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kab. Sragen	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan pengawalan (Kasus)		75.375.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)

Kode							Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
							Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Capaian Program/Keluaran Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Capaian Program/Keluaran Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	05	02	2	01	02		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkadamelalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kab. Sragen	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang akukan Penindakan (Kasus)		235.035.000	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkadamelalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kab. Sragen	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang akukan Penindakan (Kasus)		235.035.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)
1	05	02	2	01	04		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Sragen	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)		15.790.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Sragen	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)		15.790.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)
1	05	02	2	01	05		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Sragen	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (orang)		29.077.300	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Sragen	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (orang)		29.077.300	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)
1	05	02	2	01	08		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kab. Sragen	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuak dan Dimutakhirkan (dokumen)		2.260.000	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kab. Sragen	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuak dan Dimutakhirkan (dokumen)		2.260.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)
1	05	02	2	01	09		Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kab. Sragen	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	2	2.200.000	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kab. Sragen	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	2	2.200.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)
1	05	02	2	02			Peneqakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Sragen	Jumlah pelanqqaran atas pelaksanaan Perda/Perkada yang diteqakkan (Kasus)		178.492.000	Peneqakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Sragen	Jumlah pelanqqaran atas pelaksanaan Perda/Perkada yang diteqakkan (Kasus)		178.492.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)

Kode							Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
							Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Capaian Program/Keluaran Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Capaian Program/Keluaran Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	05	02	2	02	01		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Sragen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha (Laporan)		21.066.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Sragen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha (Laporan)		21.066.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)
1	05	02	2	02	02		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Sragen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota (Laporan)		157.426.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Sragen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota (Laporan)		157.426.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)
1	05	02	2	02	03		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Sragen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	221	157.426.000	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Sragen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota yang Dapat Ditangani Sesuai SOP		157.426.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)
1	05	04					PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULAN GAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kab. Sragen	Prosentase cakupan pelayanan pemadaman kebakaran dan Non Kebakaran	100	926.000.000	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULAN GAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kab. Sragen	Prosentase cakupan pelayanan pemadaman kebakaran dan Non Kebakaran	100	1.028.641.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)
1	05	04	2	01			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sragen	Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat dan non kebakaran) (Jenis)		926.000.000	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sragen	Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat dan non kebakaran) (Jenis)		926.000.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)

Kode							Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
							Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Capaian Program/Keluaran Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Capaian Program/Keluaran Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	05	04	2	01	01		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sragen	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggu- langan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumwn)		2.959.850	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sragen	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggul- angan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumwn)		2.959.850	Baru (Sudah tercantum di Renstra)
1	05	04	2	01	02		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sragen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)		863.728.150	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sragen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)		863.728.150	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)
1	05	04	2	01	03		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Sragen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakua- si Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Laporan)		40.192.000	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Sragen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuas- i Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Laporan)		40.192.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)
1	05	04	2	01	06		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Satpol PP Sragen	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)		4.685.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Satpol PP Sragen	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)		4.685.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)
1	05	04	2	01	07		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Satpol PP Sragen	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Satpol PP Sragen	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)			Baru (Sudah tercantum di Renstra)

Kode							Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
							Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Capaian Program/Keluaran Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Capaian Program/Keluaran Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	05	04	2	02			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kab. Sragen	Jumlah kantor/perusahaan yang diinspeksi (kantor)		2.680.000	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kab. Sragen	Jumlah kantor/perusahaan yang diinspeksi (kantor)		2.680.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)
1	05	04	2	02	01		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Sragen	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lin gkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (dokumen)		2.680.000	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Sragen	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lin gkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (dokumen)		2.680.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)
1	05	04	2	04			Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Kab. Sragen	Jumlah relawan kebakaran dibawah binaan Satpol PP (Orang)		11.755.000	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Kab. Sragen	Jumlah relawan kebakaran dibawah binaan Satpol PP (Orang)		11.755.000	Baru (Sudah tercantum di Renstra)
1	05	04	2	04	01		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Sragen	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)		6.400.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Sragen	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)		6.400.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)
1	05	04	2	04	02		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kab. Sragen	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) setiap tahunnya (Desa/Kelurahan)		5.355.000	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kab. Sragen	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) setiap tahunnya (Desa/Kelurahan)		5.355.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)

2.5. Review terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah. Meskipun Satpol PP berhubungan langsung dengan masyarakat, namun usulan dari masyarakat sudah ditampung oleh kecamatan, sehingga usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan untuk tahun 2023 NIHIL.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para
Pemangku Kepentingan Tahun 2025
SATPOL PP

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, *teknokratik*, *partisipatif*, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) melaporkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 memasukkan dua substansi utama, yaitu : (1) Bagaimana RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2025-2045 atau Indonesia Emas 2045, dapat tercapai di dalam fondasi lima tahun; (2) Adanya penuangan visi-misi dan program Presiden terpilih pada tahun 2024 ke dalam RPJMN 2025-2029.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan 8 prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Azasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas. Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan

Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
6. Pembangunan dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta memperkuat Percepatan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sragen dijabarkan dalam 8 prioritas daerah (PD) sebagai berikut:

1. Perwujudan kemandirian ekonomi daerah.
2. Perwujudan layanan investasi yang berkualitas.
3. Pemantapan kualitas infrastruktur.
4. **Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah.**
5. Penguatan kualitas SDM dan kualitas hidup masyarakat.
6. Penguatan Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran.
7. Perwujudan ketahanan pangan masyarakat.
8. Perwujudan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Untuk mendukung Prioritas Daerah Kabupaten Sragen ke-4 yaitu Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah, pada fokus Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan kondusivitas daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen melaksanakan 2 (dua) program sebagai berikut:

1. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum.
2. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

Keterkaitan Program di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen dan Prioritas Nasional Tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Keterkaitan Program di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen dan Prioritas Nasional Tahun 2025

No	Prioritas Nasional	Prioritas Kabupaten Sragen	Program di Satpol PP
6	Pembangunan dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	1. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum. 2. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen yang berjumlah 2 program selaras dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2025 ke- 4 dan prioritas nasional ke-6. Seluruh program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen selaras dan mendukung prioritas nasional RKP tahun 2025.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, tujuan dan sasaran, Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Satpol PP Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 yang disusun mengacu pada RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026. Tahun 2025 merupakan tahun keempat dalam RPJMD Kabupaten Sragen 2021-2026 dengan tema **“Peningkatan ekonomi melalui peningkatan investasi, pemberdayaan UMKM dan daya saing pariwisata”**. Agenda pembangunan daerah Kabupaten Sragen dalam 5 (lima) tahun ke depan harus sesuai dengan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih. Arah pembangunan daerah Kabupaten Sragen dijabarkan ke dalam 8 prioritas daerah (PD) sebagai berikut:

1. Perwujudan kemandirian ekonomi daerah;
2. Perwujudan layanan investasi yang berkualitas;
3. Pemantapan kualitas infrastruktur wilayah;
4. **Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah;**

5. Penguatan kualitas SDM dan kualitas hidup masyarakat;
6. Penguatan Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran;
7. Perwujudan ketahanan pangan masyarakat;
8. Perwujudan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP, Prioritas Pembangunan daerah yang dapat didukung pencapaiannya oleh Satpol PP adalah Prioritas ke-4 yaitu perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah.

Tujuan dan sasaran Satpol PP Kab. Sragen sudah ditetapkan pada Renstra Satpol PP Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran Satpol PP

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA			TARGET 2022-2026				
	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tujuan : Mewujudkan keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum	Jumlah pelanggaran gangguan tibum data tahun N-1 dikurangi jumlah pelanggaran tahun N dibagi data tahun N-1 dikali 100%	5%	5%	6%	7%	7%
2	Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya	Tingka Layanan Penanganan Kebakaran	Jumlah kejadian kebakaran yang dilayani dibagi jumlah kejadian kebakaran yang dilaporkan dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Sasaran : Menjamin Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Tingkat Pelayanan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	Jumlah dan identitas Warga Negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum akibat pelanggaran Perda/Perkada Kab/kota serta <i>mengalami kerugian materi dan/atau terkena cedera fisik</i> dibagi Jumlah Warga Negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum akibat pelanggaran Perda Kabupaten/Kota dan Perkada dikali 100%	60%	65%	70%	75%	80%
4		Persentase penurunan pelanggaran Perda/ Perkada	Jumlah pelanggaran Perda/Perkada data tahun N-1 dikurangi jumlah pelanggaran tahun N dibagi data tahun N-1 dikali 100%	5%	5%	6%	7%	7%
5	Sasaran : Meningkatnya layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit penanggulangan kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun N dalam tingkat waktu tanggap (response time) dibagi jumlah kejadian kebakaran di Kab/Kota Tahun N dikali 100%	43%	45%	47%	49%	51%

3.3. Program dan Kegiatan

Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Satpol PP Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Sragen dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain:

1. Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021– 2026;
2. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025.

Sesuai dengan misi ke-2 yaitu ***“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi”***, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 juga disinkronkan dengan sasaran yang akan dicapai dalam RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 yang salah satunya adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi, dengan strategi meningkatnya keamanan, ketentraman, dan perlindungan masyarakat.

Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan Renja Satpol PP Kabupaten Sragen Tahun 2025 dengan melaksanakan 3 (tiga) program, meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan Renja Satpol PP Kabupaten Sragen Tahun 2025 dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang, dengan rincian:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

I.1. *Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

I.2. *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

I.3. *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:*

1. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Penataan Arsip Dinamis pada SKPD

I.4. Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

I.5. Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

II. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN & KETERTIBAN UMUM

II.1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, pengamanan, dan pengawalan
- 1.2. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
- 1.3. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan Ketertiban Umum
- 1.4. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
- 1.5. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
- 1.6. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

II.2. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

1.1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

1.2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

1.3. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan Bupati/Walikota

III. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

III.1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- c. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
- d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
- e. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

III.2. Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

- a. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

III.3. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran

- a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
- b. Pembentukan Relawan Kebakaran.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 serta pagu indikatif, dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 demi mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah. Disamping itu, untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang diemban. Dalam mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen.

Program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen Tahun 2024, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-137 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2025 serta prakiraan maju tahun 2026 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen, secara terperinci dapat dilihat pada **tabel 4.1** sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 Kabupaten Sragen
OPD: Satuan Polisi Pamong Praja

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Kelompok Sasaran	Indikator Kinerja (Hasil Program/Keluaran Kegiatan/Keluaran Sub Kegiatan)		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	P. Jawab
											Tolok Ukur	Target		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	
1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANTIBUMLINMAS							9.915.590.298		9.915.590.298		
1	05	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA			Kab. Sragen		Presentase ketercapaoan pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (Persen)	100%	7.712.227.798	100%	7.712.227.798	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)	Kepala Dinas
1	05	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Sragen		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen)	4	13.999.000	4	13.999.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)	Sekretaris Dinas
1	05	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Sragen	Pegawai Satpol PP Kab. Sragen	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	7.000.000	2	7.000.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)	Subbag PEP
1	05	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Sragen	Pegawai Satpol PP Kab. Sragen	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	6.999.000	2	6.999.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)	Subbag PEP
1	05	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Kab. Sragen		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	12	6.890.506.698	12	6.890.506.698	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)	Sekretaris Dinas
1	05	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Sragen	ASN Satpol PP Kab. Sragen	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/Bulan)	56	6.890.506.698	56	6.890.506.698	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)	Subbag Keuangan
1	05	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Kab. Sragen		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Laporan)	12	282.634.500	12	282.634.500	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)	Sekretaris Dinas
1	05	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Sragen	Alat Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	1	3.206.000	1	3.206.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)	Subbag Umpeg
1	05	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Sragen	ATK, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	2	47.017.000	2	47.017.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)	Subbag Umpeg
1	05	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Sragen	Pengadaan makan minum rapat, makan minum tamu, rapat	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	65	165.660.000	65	165.660.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)	Subbag Umpeg

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Kelompok Sasaran	Indikator Kinerja (Hasil Program/Keluaran Kegiatan/Keluaran Sub Kegiatan)		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	P. Jawab
											Tolok Ukur	Target		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	
										subosuko dan ekstrafooding							
1	05	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Sragen	Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	1	3.737.000	1	3.737.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)	Subbag Umpeg
1	05	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kab./Kota Luar Daerah Kab. Sragen	Pegawai Satpol PP Kab. Sragen	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	60	60.000.000	60	60.000.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)	Subbag Umpeg
1	05	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Kab. Sragen	Arsip Satpol PP	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	3.014.500	1	3.014.500	baru (Sudah tercantum di Renstra)	Subbag Umpeg
1	05	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kab. Sragen		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	12	99.706.000	12	99.706.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)	Sekretaris Dinas
1	05	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Sragen	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan (Laporan)	12	14.800.000	12	14.800.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)	Subbag Umpeg
1	05	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Sragen	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	12	9.860.000	12	9.860.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)	Subbag Umpeg
1	05	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Sragen	Alat Kebersihan, Petugas Kebersihan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	12	75.046.000	12	75.046.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)	Subbag Umpeg
1	05	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kab. Sragen		Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	12	425.381.600	12	425.381.600	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)	Sekretaris Dinas
2	12	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Sragen	Kendaraan Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	31	425.381.600	31	425.381.600	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)	Subbag Umpeg
1	05	02				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Kab. Sragen		Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat ditangani dan diselesaikan (Persen)	100	1.042.362.500	100,00	1.042.362.500	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)	Kepala Dinas
											Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (Persen)	65		65			Kepala Dinas

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Kelompok Sasaran	Indikator Kinerja (Hasil Program/Keluaran Kegiatan/Keluaran Sub Kegiatan)		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	P. Jawab
											Tolok Ukur	Target		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	
1	05	02	2	01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Sragen		Jumlah kasus pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kabupaten yang ditangani dan diselesaikan (Kasus)	1.789	588.872.000	1.789	588.872.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)	Kabid Gakda dan Tibum
1	05	02	2	01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			Kab. Sragen	Masyarakat Kab. Sragen	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1	115.567.200	1	115.567.200	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)	Bidang Tibum (Kasi Linmas & Kerjasama)
1	05	02	2	01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			Kab. Sragen	Pegawai Satpol PP Kab Sragen	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (orang)	200	96.300.000	200	96.300.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)	Bidang Tibum (Kasi Linmas & Kerjasama)
1	05	02	2	01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat			Kab. Sragen	Pegawai Satpol PP Kab. Sragen	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (dokumen)	1	2.818.000	1	2.818.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)	Bidang Tibum (Kasi Opsdalop)
1	05	02	2	01	15	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, pengamanan, dan pengawalan			Kab. Sragen	Masyarakat Kab. Sragen	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan pengawalan (Kasus)	1.727	138.620.000	1.727	138.620.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)	Bidang Tibum (Kasi Opsdalop)
1	05	02	2	01	16	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa			Kab. Sragen	Masyarakat Kab. Sragen	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang akukan Penindakan (Kasus)	62	233.366.800	62	233.366.800	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)	Bidang Tibum (Kasi Opsdalop)
1	05	02	2	01	17	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada			Kab. Sragen	Masyarakat Kab. Sragen	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	2	2.200.000	2	2.200.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)	Bidang Gakda (Kasi Penindakan)
1	05	02	2	02		Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota			Kab. Sragen		Jumlah pelanggaran atas pelaksanaan Perda/Perkada yang ditegakkan (Kasus)	1.245	453.490.500	1.245	453.490.500	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)	Kabid Gakda
1	05	02	2	02	10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			Kab. Sragen	Masyarakat Kab. Sragen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha (Laporan)	5	28.293.500	5	28.293.500	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)	Bidang Gakda (Kasi Binwasluh)

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Kelompok Sasaran	Indikator Kinerja (Hasil Program/Keluaran Kegiatan/Keluaran Sub Kegiatan)		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	P. Jawab
											Tolok Ukur	Target		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	
1	05	02	2	02	11	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			Kab. Sragen	Masyarakat Kab. Sragen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota yang Dapat Ditangani Sesuai SOP (Laporan)	200	350.821.000	200	350.821.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)	Bidang Gakda (Kasi Penindakan)
1	05	02	2	02	12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Kab. Sragen	Masyarakat Kab. Sragen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota (Laporan)	20	74.376.000	20	74.376.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)	Bidang Gakda (Kasi Binwasluh)
1	05	04				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			Kab. Sragen		Prosentase cakupan pelayanan pemadaman kebakaran dan Non Kebakaran (Persen)	100	1.161.000.000	100	1.161.000.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)	Kepala Dinas
1	05	04	2	01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Sragen		Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat dan non kebakaran) (Jenis)	5	1.132.640.000	5	1.132.640.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)	Kabid Damkar
1	05	04	2	01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Sragen	SOP Damkar	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumwn)	2	6.124.000	2	6.124.000	Baru (Sudah tercantum di Renstra)	Bidang Damkar (Kasi Pencegahan)
1	05	04	2	01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Sragen	Masyarakat Kab. Sragen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	80	918.666.000	80	918.666.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)	Bidang Damkar (Kasi Pemadaman)
1	05	04	2	01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran			Kab. Sragen	Masyarakat Kab. Sragen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Laporan)	240	71.500.000	240	71.500.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)	Bidang Damkar (Kasi Pemadaman)
1	05	04	2	01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran			Satpol PP Sragen	Pegawai Damkar	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	10	13.760.000	10	13.760.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)	Bidang Damkar (Kasi Pemadaman)
1	05	04	2	01	17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			Satpol PP Sragen	Sarana Prasarana Damkar	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	10	122.590.000	10	122.590.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)	Bidang Damkar (Kasi Pemadaman)

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Kelompok Sasaran	Indikator Kinerja (Hasil Program/Keluaran Kegiatan/Keluaran Sub Kegiatan)		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	P. Jawab
											Tolok Ukur	Target		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	
1	05	04	2	02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			Kab. Sragen		Jumlah kantor/perusahaan yang diinspeksi (kantor)	4	2.680.000	4	2.680.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)	Kabid Damkar
1	05	04	2	02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			Kab. Sragen	Kantor/Perusahaan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (dokumen)	1	2.680.000	1	2.680.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)	Bidang Damkar (Kasi Pencegahan)
1	05	04	2	04		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran			Kab. Sragen		Jumlah relawan kebakaran dibawah binaan Satpol PP (Orang)	120	25.680.000	120	25.680.000	Baru (Sudah tercantum di Renstra)	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
1	05	04	2	04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat			Kab. Sragen	Masyarakat Kab. Sragen	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	200	20.325.000	200	20.325.000	Sedang berjalan (Sudah tercantum di Renstra)	Bidang Damkar (Kasi Pencegahan)
1	05	04	2	04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran			Kab. Sragen	Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebak(aran Lingkungan (SKKL) setiap tahunnya (Desa/ Kelurahan)	5	5.355.000	5	5.355.000	Baru (Sudah tercantum di Renstra)	Bidang Damkar (Kasi Pemadaman)

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat. Keterlibatan *stakeholders* sangat diperlukan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran, sehingga tercipta *Good Governance* seperti yang diinginkan. Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan dokumen yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan/sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

5.1. CATATAN PENTING

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen Tahun 2025 antara lain:

1. Target capaian kinerja dari semua indikator kinerja dalam rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan Satpol PP Kabupaten Sragen, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Evaluasi rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang meliputi kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, lokasi pelaksanaan, kelompok sasaran, sumber pendanaan dan kebutuhan dana/pagu indikatif dilaksanakan sesuai dengan situasi, kondisi dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta menyesuaikan dengan kebijakan dan peraturan terbaru;
3. Fokus utama pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dilaksanakan secara menyeluruh, baik dari jajaran tertinggi hingga jajaran terendah dengan optimalisasi sumber daya yang dimiliki dalam rangka peningkatan capaian kinerja, bukan sekedar menitikberatkan pada realisasi/penyerapan anggaran;
4. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama internal, lintas instansi pemerintah, instansi swasta, maupun sektor informal yang terkait dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam rangka peningkatan kinerja.

5.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam rangka menjamin pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, Renja Satpol PP Kabupaten Sragen Tahun 2025 perlu memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Renja Satpol PP Kabupaten Sragen Tahun 2025 dilaksanakan oleh seluruh jajaran Satpol PP Kabupaten Sragen secara efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
2. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Satpol PP Kabupaten Sragen Tahun 2025 dilaksanakan secara tertib, obyektif dan disampaikan dalam bentuk laporan tertulis kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Sragen secara periodik dan berkesinambungan;
3. Renja Satpol PP Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan/atau daerah selama pelaksanaan Renja, perubahan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terjadi akan dimuat dalam Perubahan Renja Satpol PP Kabupaten Sragen Tahun 2025.

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti Satpol PP Kabupaten Sragen pada tahun 2025 antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan secara menyeluruh, baik pelayanan di bidang Trantibumlinmas dan pelayanan di pemadaman Kebakaran;
2. Peningkatan dan optimalisasi inovasi pelayanan pengaduan, yang salah satunya dengan SI JAGA SUKOWATI.

Dengan disusunnya Renja Satpol PP Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini, diharapkan dapat mewujudkan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang konsisten dan berkesinambungan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Kabupaten Sragen Tahun 2025 juga diharapkan menjadi acuan, pedoman, dan tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih membutuhkan kritik dan saran untuk dapat membantu perbaikan di masa mendatang.

Sragen, 17 Juli 2024
Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SRAGEN

AGUS WINARNO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19710313 199803 1 008